

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

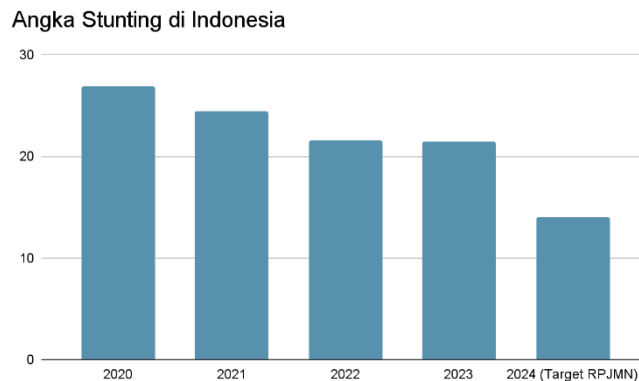
Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan gizi yang terus meningkat, berbeda dengan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand yang mengalami perbaikan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masalah gizi di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu yang sudah terkendali, yang belum terselesaikan, dan yang semakin meningkat serta mengancam kesehatan masyarakat. Permasalahan ini berdampak luas pada kesehatan, pertumbuhan anak, dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanganan masalah gizi harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Beberapa masalah gizi yang telah berhasil dikendalikan di Indonesia antara lain kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), dan anemia. Pemerintah telah menjalankan berbagai program seperti pemberian kapsul vitamin A di Puskesmas dan penambahan yodium dalam garam konsumsi. Selain itu, ibu hamil juga diberikan suplemen zat besi untuk mencegah anemia yang dapat meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan. Langkah-langkah ini menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi beberapa permasalahan gizi yang sebelumnya cukup mengkhawatirkan.

Namun, masih terdapat masalah gizi yang belum terselesaikan, seperti stunting dan gizi kurang. Stunting menjadi isu serius dengan prevalensi 21,6% pada tahun 2022, yang disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang, terutama dalam 1.000

hari pertama kehidupan anak. Gizi kurang juga masih menjadi tantangan, terutama bagi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang lebih rentan mengalami komplikasi kesehatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan intervensi dini sangat penting untuk mengurangi angka kejadian stunting dan gizi kurang di Indonesia (HalloSehat, 2024)

Gambar 1. 1 Angka Stunting Di Indonesia



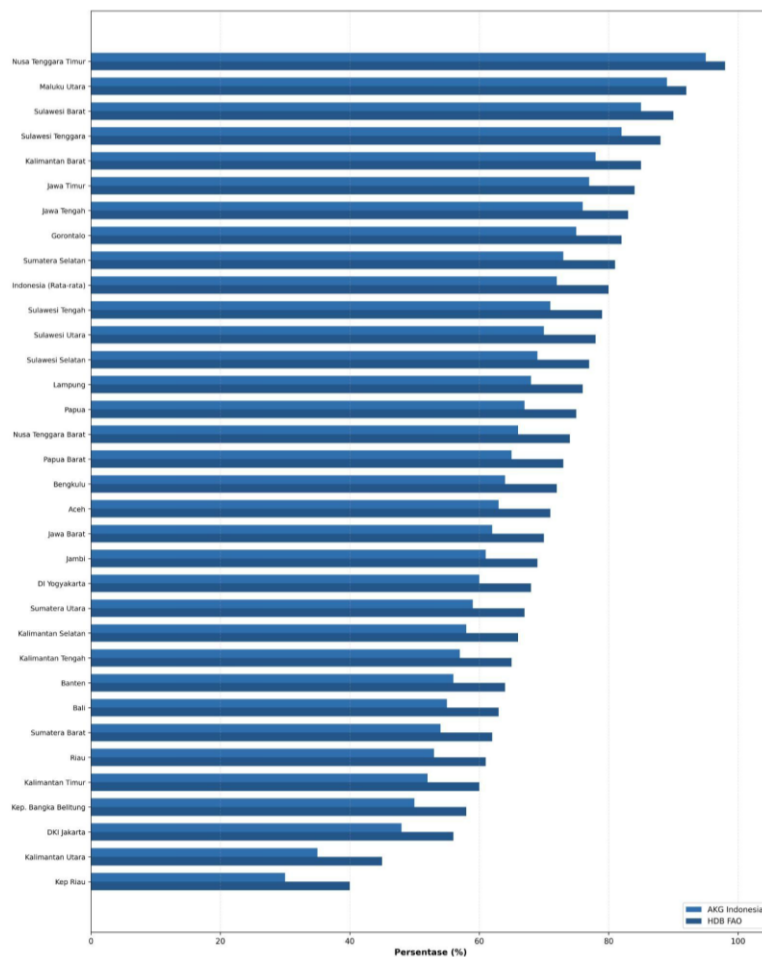
Sumber: Survei Status Gizi Indonesia 2022

Target RPJMN 2024 untuk mengurangi angka stunting Indonesia hingga menuju ke angka 14, dirasa masih menjadi tantangan yang cukup sulit untuk menekan angka masalah gizi yang ada di Indonesia. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat menjadi langkah penting dalam menekan angka masalah gizi. Selain itu, kebijakan yang mendukung akses terhadap makanan bergizi perlu diperkuat agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh nutrisi yang cukup. Dengan upaya bersama, diharapkan kualitas kesehatan masyarakat

dapat meningkat serta tercipta generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan. Namun, upaya untuk meningkatkan akses terhadap pangan bergizi tidaklah mudah, mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam menjangkau makanan sehat akibat keterbatasan ekonomi.

Permasalahan akses terhadap pangan bergizi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan analisis tim jurnalis data Harian Kompas, biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi mencapai Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan. Standar ini didasarkan pada komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) yang juga digunakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Namun, realitas menunjukkan bahwa 68 persen atau sekitar 183,7 juta penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi biaya tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses terhadap makanan bergizi yang masih tinggi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Gambar 1. 2 Masyarakat yang Tidak Bisa Menjangkau Pangan Gizi Berimbang



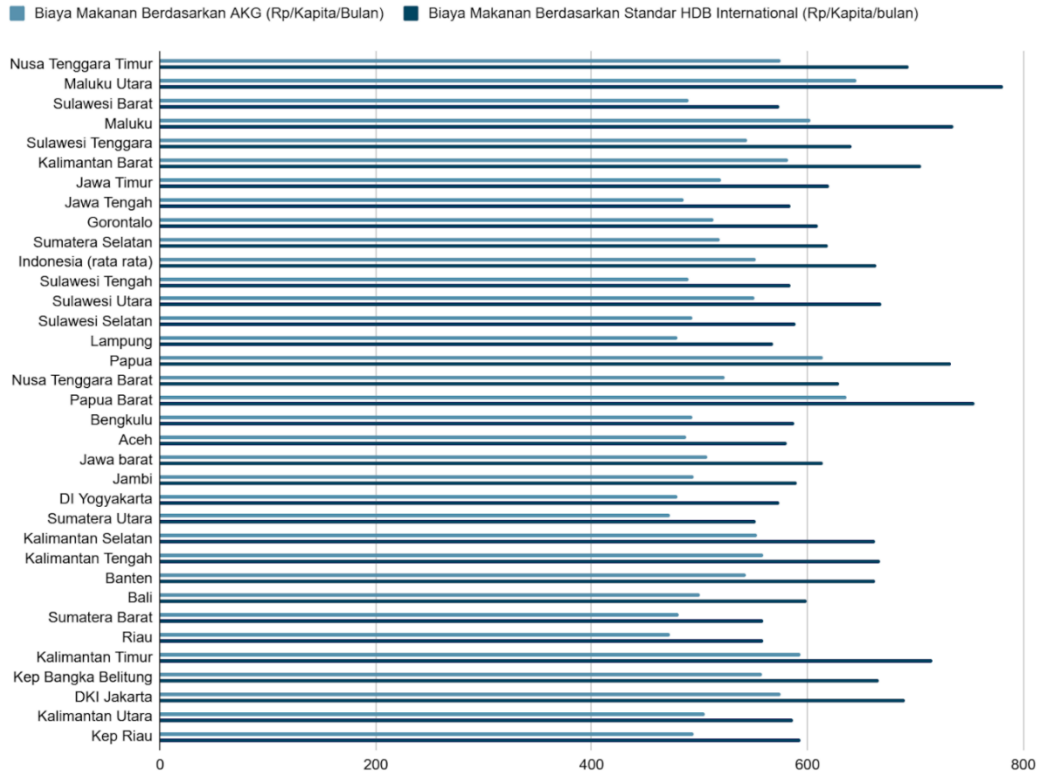
Sumber: Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 90 Kata di Indonesia 2021 (BPS). Data Mikro Susenas Maret 2021 BPS (Diolah), dan Hasil olahan kalkulator Cost of a Healthy Diet buatan proyek penelitian Food Prices for Nutrition Tufts University Amerika Serikat, Diolah Kompas/PUT/SPW/XNA

Lebih lanjut, FAO mencatat bahwa Indonesia memiliki harga pangan bergizi tertinggi di Asia Tenggara jika memperhitungkan daya beli masyarakatnya. Dengan paritas daya beli (PPP), harga pangan bergizi di Indonesia mencapai 4,47

dollar AS per hari, lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Ketimpangan ini semakin terasa di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki biaya pangan bergizi di atas rata-rata nasional. Di NTT, misalnya, biaya pangan bergizi mencapai Rp 23.126 per hari, dan 86 persen penduduknya tidak mampu membeli pangan bergizi. Sementara di Maluku Utara, 80 persen penduduk menghadapi kendala serupa akibat harga pangan yang tinggi dan distribusi bahan makanan yang belum merata.

Gambar 1. 3 Biaya Makan Bergizi

Biaya Makan Bergizi



Sumber: Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 90 Kata di Indonesia 2021 (BPS). Data Mikro Susenas Maret 2021 BPS (Diolah), dan Hasil olahan kalkulator Cost of a Healthy Diet buatan proyek penelitian Food Prices for Nutrition Tufts University Amerika Serikat, Diolah Kompas/PUT/SPW/XNA

Tingginya harga pangan bergizi di beberapa wilayah disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, keterbatasan distribusi pangan, serta ketimpangan rantai pasok antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Ayip Said Abdullah, menekankan bahwa disparitas harga pangan ini terjadi karena sistem rantai pasok yang belum tertata dengan baik. Tanpa kebijakan yang kuat dalam memperbaiki rantai pasok pangan nasional, kesenjangan ini akan terus berlanjut dan memperburuk ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah dalam memastikan akses pangan bergizi yang lebih merata, terutama bagi kelompok rentan yang selama ini menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari (Kompas, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan akses pangan bergizi, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling terdampak. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui implementasi program intervensi gizi yang bersifat masif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, terutama bagi anak-anak yang berisiko mengalami kekurangan gizi.

Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi kesenjangan akses pangan sekaligus memperbaiki status gizi masyarakat secara luas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan oleh pemerintah pada 6 Januari 2025 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di

Indonesia. Program ini dirancang untuk menjangkau jutaan anak dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Hingga pertengahan Februari 2025, jumlah penerima manfaat telah mencapai 770 ribu anak dan ditargetkan bertambah menjadi satu juta anak pada akhir bulan yang sama. Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa cakupan program ini akan semakin luas, dengan target minimal enam juta anak dapat menikmati manfaat MBG pada akhir Juli 2025.

Namun, implementasi program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan sorotan, terutama dalam hal efektivitas, kualitas gizi, serta keamanan pangan. Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, menilai bahwa masih terdapat ruang perbaikan untuk memastikan MBG mencapai hasil yang optimal.

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan para ahli, dalam perencanaan dan evaluasi MBG juga menjadi faktor kunci dalam penyempurnaan tata kelola program. Pemerintah perlu menyediakan kanal aduan publik yang terintegrasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menampung keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian prosedur maupun kualitas menu yang disajikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan MBG dapat menjadi program yang lebih transparan, akuntabel, serta berdampak nyata dalam meningkatkan status gizi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Sebagai langkah konkret dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program pemenuhan gizi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 83

Tahun 2024. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai kebijakan strategis lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Dengan adanya payung hukum ini, diharapkan implementasi program dapat berjalan lebih sistematis, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan status gizi nasional.

Keterbatasan regulasi yang ada menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan agar implementasi MBG dapat berjalan lebih optimal. Meskipun Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang kuat, diperlukan regulasi turunan yang lebih teknis untuk memastikan efektivitas program di lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial dalam penyusunan dan penerapan regulasi yang lebih rinci, terutama dalam aspek pengawasan kualitas pangan serta mekanisme distribusi yang efisien. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat tetapi juga dapat menjamin pemenuhan gizi yang sesuai standar kesehatan.

Implementasi program MBG menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek regulasi dan tata kelola. Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, menyoroti bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaan MBG agar mencapai hasil yang optimal. Salah satu aspek penting yang perlu dibenahi adalah regulasi dan petunjuk teknis yang lebih rinci guna memastikan program ini berjalan secara efektif dan

terstruktur. Saat ini, regulasi MBG yang tersedia masih terbatas pada Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur petunjuk teknis operasional MBG, namun belum mencakup detail standar kebersihan, keamanan pangan, pengemasan, serta distribusi makanan.

Kesiapan regulasi dan tata kelola yang matang sangat krusial dalam keberhasilan program ini. Sebagai perbandingan, Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang telah berjalan sejak 2018 memiliki payung hukum yang lebih kuat, dengan regulasi setingkat Peraturan Presiden dan didukung oleh peraturan kementerian serta petunjuk teknis yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa MBG memerlukan regulasi yang lebih tinggi untuk mengatur koordinasi lintas sektor serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapannya.

Kajian pertama mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipublikasikan oleh CISDI pada Agustus 2024 menyoroti bahwa kompleksitas dan besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam program ini memerlukan kerangka regulasi serta tata kelola yang baik. Keberadaan regulasi yang jelas sangat penting agar proses perencanaan hingga implementasi MBG dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Namun, pada fase awal uji coba program MBG di akhir 2024, ditemukan beberapa tantangan utama, di antaranya ketidakjelasan target sasaran program, keterbatasan anggaran, serta belum terstrukturinya kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang mendukung keberjalanan program. Meskipun telah

melalui berbagai tahap uji coba, dinamika pelaksanaan program MBG masih mengalami kendala, terutama akibat belum adanya kerangka regulasi dan tata kelola yang memadai. Hasil diskusi bersama panel ahli mengungkapkan bahwa satu-satunya regulasi yang tersedia saat ini adalah Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran BGN No. 2 Tahun 2024, yang hanya mengatur aspek teknis operasional MBG. Namun, surat keputusan di tingkat kedeputian ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya bersifat administratif. Padahal, untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program, MBG membutuhkan regulasi dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi guna mengatur tata kelola serta mekanisme kerja lintas sektor secara lebih komprehensif.

Minimnya transparansi dalam penyusunan regulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi program ini. Dokumen petunjuk teknis (juknis) MBG tidak diunggah di kanal resmi Badan Gizi Nasional (BGN) dan hanya ditemukan melalui situs berbagi dokumen, menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam penyediaan informasi publik. Selain itu, setelah dilakukan telaah lebih lanjut, juknis tersebut juga belum mengatur secara rinci aspek operasional MBG, seperti standar kebersihan, keamanan pangan, pengumpulan bahan, pengemasan, suplai, hingga mekanisme penyaluran makanan. Jika dibandingkan dengan program lain, seperti Percepatan Penurunan Stunting yang memiliki regulasi setingkat peraturan presiden serta didukung oleh peraturan menteri dan petunjuk teknis bagi pemerintah daerah, regulasi MBG masih jauh tertinggal. Bahkan, program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-

AS) telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat melalui Permendagri 18/2011, yang secara jelas mengoordinasikan peran lintas sektor.

Ketiadaan regulasi yang memadai dalam program MBG berimplikasi pada lemahnya struktur tata kelola serta terbatasnya koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) terkait. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang jelas mengenai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing K/L dalam mendukung pelaksanaan MBG. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), misalnya, baru secara resmi dilibatkan dalam program ini setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama BGN pada 23 Januari 2025. Sebelum itu, tidak ada kejelasan mengenai otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan pangan, padahal BGN secara kelembagaan tidak memiliki fungsi tersebut sebagaimana diatur dalam Perpres 83/2024. Permasalahan serupa juga terjadi dalam aspek promotif-preventif gizi. Dengan dihapuskannya Direktorat Gizi dari struktur organisasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2025, terjadi kekosongan kewenangan dalam pelaksanaan intervensi gizi yang sebelumnya menjadi bagian dari tugas direktorat tersebut. Hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari pemerintah pusat untuk menyusun pembagian peran dan alur koordinasi antara BGN dan Kementerian Kesehatan guna memastikan keberlanjutan program MBG yang terintegrasi dengan intervensi gizi promotif-preventif.

Selain itu, kecenderungan sentralisasi tata kelola MBG di bawah BGN juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas program ini (Tabel 1.4). Sejak tahap

pengembangan dan uji coba, MBG sepenuhnya dikendalikan oleh BGN melalui operasionalisasi Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG), tanpa keterlibatan yang optimal dari kementerian lain maupun pemerintah daerah. Baru pada 31 Desember 2024, atau hanya tujuh hari sebelum peluncuran program, BGN mulai membuka kemitraan untuk implementasi MBG. Keterlambatan pelibatan aktor lain, termasuk BPOM yang baru dilibatkan tiga minggu setelah program berjalan, menunjukkan minimnya koordinasi lintas K/L dalam kerangka institusional MBG. Dampak dari sentralisasi ini terlihat pada kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program MBG. Beberapa daerah melaporkan belum adanya petunjuk teknis operasional yang jelas, kurangnya sosialisasi teknis, serta minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam tahap uji coba dan perencanaan program. Laporan dari Institut Harkat Negeri juga mengindikasikan bahwa sejumlah daerah masih mengalami kesulitan dalam mengakses panduan implementasi MBG. Padahal, BGN memiliki fungsi koordinasi horizontal dan vertikal yang seharusnya dioptimalkan untuk menjadikan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program.

Tata kelola program makan gratis di sekolah (*free school meals*) di India, Brazil, dan Jepang menjadi referensi utama bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga negara tersebut memiliki infrastruktur regulasi yang kuat, dengan landasan hukum setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur program makan gratis di sekolah. Sebagai contoh, di Brazil, aturan dalam konstitusi diterjemahkan dalam

Undang-Undang No. 11.947/2009 yang mengatur kewenangan seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan pemerintahan serta hubungan antara negara dan sektor swasta. Regulasi ini juga mencakup mekanisme pengelolaan konflik kepentingan dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengalokasikan pembiayaan untuk belanja bahan pangan segar melalui skema budget tagging.

Selain itu, peran pemerintah sub-nasional dalam siklus program makan gratis di sekolah sangat signifikan di ketiga negara tersebut. Brazil, India, dan Jepang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi program. Di India, misalnya, proses monitoring dilakukan secara berjenjang melalui komite lintas sektor mulai dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan, hingga sekolah. Komite ini terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat sipil, ahli gizi, penyuluh kesehatan, pihak sekolah, dan orang tua siswa. Mekanisme ini memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Ketiga negara juga menerapkan model desentralisasi dalam pengelolaan program makan gratis di sekolah. Pendekatan ini memungkinkan rantai distribusi menjadi lebih singkat karena proses pengolahan makanan dilakukan langsung di sekolah. Di Jepang, program makan gratis bahkan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan, di mana sekolah dan siswa turut serta dalam pengelolaan serta pemahaman akan pentingnya pola makan sehat. Model ini tidak hanya memperpendek rantai pasok, tetapi juga meningkatkan kesadaran gizi sejak dini.

Selain peran pemerintah, keterlibatan mitra pembangunan global juga menjadi aspek penting dalam keberlanjutan program. Di Brazil dan India, organisasi internasional seperti *World Food Programme* (WFP) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) terlibat langsung dalam pengembangan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi program. Keduanya memberikan asistensi teknis guna meningkatkan kapasitas negara dalam mengelola program makan gratis di sekolah. Sementara itu, Jepang merupakan satu-satunya negara yang menjalankan program ini sepenuhnya dengan sumber daya domestik. Studi kasus dari ketiga negara ini memberikan pembelajaran yang berharga bagi Indonesia dalam merancang sistem tata kelola MBG yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam implementasi MBG juga menjadi isu yang menimbulkan pro dan kontra. Menurut laporan Kontan (2025), sebanyak 351 Komando Distrik Militer (Kodim), 14 Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), dan 41 Pangkalan Udara (Lanud) turut serta dalam penyelenggaraan MBG. Meskipun keterlibatan TNI dapat memperkuat kapasitas logistik dan distribusi, terdapat kekhawatiran mengenai relevansi pendekatan militer dalam program gizi yang lebih bersifat promotif-preventif. Selain itu, sistem rantai komando yang menjadi karakteristik institusi militer berisiko mempengaruhi objektivitas dalam proses monitoring dan evaluasi program. Padahal, evaluasi yang transparan dan berbasis data sangat diperlukan dalam menyempurnakan program MBG ke depannya.

Ketidaksempurnaan regulasi MBG juga membuka potensi konflik kepentingan dalam kemitraan program ini. Hingga saat ini, pemerintah belum meregulasi secara tegas strategi distribusi, penyelenggaraan dapur sentral (SPPG), serta keterlibatan aktor bisnis dalam penyediaan produk pangan dan sumber protein. Tanpa regulasi yang jelas, terdapat potensi dominasi industri tertentu yang dapat mengarah pada praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip lingkungan pangan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 200-202 PP 28/2024 tentang Kesehatan. Beberapa laporan juga menunjukkan adanya promosi pangan ultra-proses tinggi dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) yang tinggi di lingkungan sekolah, yang dapat berlawanan dengan tujuan utama MBG dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

Tabel 1. 1 Menu MBG di beberapa lokasi Implementasi (periode 6-17 Januari 2025)

No	Lokasi Uji Coba	Menu	Jenjang	Energi (kal)	Kontribusi Terhadap AKG Energi Harian (%)	Protein (gram)	Kontribusi Terhadap AKG Protein Harian (%)
1	Jakarta Timur	Nasi putih, telur rebus, tumis wortel, dan susu	SD	466.06	24	16.68	32

		kemasan perisa					
2	Bogor	Nasi putih, sayur capcay, chicken teriyaki, satu buah jeruk, serta satu cup puding susu	SD	501.68	28	19.22	37
3	Bandung	Chicken crispy saus cream cheese, mix vegetable, semangka, nasi putih, susu kemasan berperisa	SMP	609.09	27	23.83	35
		Fish crispy vegetable saus asam manis, mie goreng,	SMP	580.98	26	18.21	27

		pisang, nasi putih					
		Burger chicken saus bbq, pokcoy saus garlic oil, pepaya, nasi putih	SMP	495.78	22	15.93	24
		Chicken katsu saus thousand island, soun with vegetable sauce, melon, nasi putih	SMP	547.7	25	17.22	26
		Korean egg roll saus bistik, tempe goreng tepung, pisang, nasi putih, susu	SMP	620.4	28	26.58	39

		kemasan berperisa					
4	Jakarta dan Depok	Nasi, ayam teriyaki	SMP	409	18	17.5	26

Sumber: Seri Dua Kajian Makan Bergizi Gratis CISDI

Analisis terhadap ketidaksiapan kerangka regulasi dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya implikasi signifikan terhadap efektivitas program. Berdasarkan hasil pemantauan media dan diskusi bersama panel ahli, terdapat tiga implikasi utama dari lemahnya regulasi dan tata kelola MBG, salah satunya terkait dengan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. Diskusi dengan para ahli mengungkapkan bahwa penyusunan kebijakan berbasis bukti dalam perencanaan MBG belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari tidak terbukanya akses terhadap studi mengenai penilaian dampak awal dan analisis biaya-manfaat dari uji coba MBG sepanjang 2024, kurangnya transparansi dalam metode penghitungan satuan harga rata-rata dan kelompok sasaran program, serta minimnya pelibatan masyarakat sipil, termasuk akademisi dan ahli, dalam seluruh siklus program. Selain itu, penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo untuk uji coba program MBG juga dinilai para ahli sebagai faktor yang menghambat akuntabilitas penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan pengalaman dari program makan gratis di sekolah yang telah diterapkan di berbagai negara.

Tinjauan sistematis oleh World Bank menunjukkan bahwa program *free school meals* secara global masih memiliki bukti terbatas terkait dampaknya terhadap indikator intervensi gizi dan perbaikan pola makan. Studi yang sama juga menunjukkan bahwa program makan gratis di sekolah memiliki bukti yang relatif lebih kuat dalam meningkatkan kehadiran siswa serta memberikan keuntungan bagi sektor pertanian melalui peningkatan permintaan bahan pangan lokal. Temuan ini menegaskan perlunya kerangka regulasi yang lebih matang agar program MBG dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sasaran.

Tabel 1. 2 Tinjauan Sistematis World Bank untuk program Free School Meals

Indikator Luaran	Basis Bukti
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti kausalitas sangat terbatas mengenai dampak dari penyelenggaraan program terhadap produksi pertanian lokal dan pendapatan petani di negara-negara berpenghasilan rendah. - Bukti yang relatif kuat mengenai keuntungan komersial dari sektor pertanian di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi.
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti yang relatif kuat tentang dampak pada partisipasi sekolah, khususnya kehadiran siswa. - Bukti yang terbatas, namun mulai muncul hasil mengenai pembelajaran, khususnya di antara sub-kelompok tertentu seperti siswa miskin dan anak perempuan.

Kesehatan dan Gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti yang terbatas dan beragam tentang dampak pada hasil gizi, seperti skor tinggi Badan menurut Umur. - Bukti yang sangat terbatas mengenai aspek gizi lainnya, seperti meningkatkan kualitas pola makan. - Penelitian yang sedang berkembang mengenai potensi makanan sekolah yang sesuai dengan gizi untuk memoderasi risiko obesitas pada masa kanak-kanak dan penyakit tidak menular yang berhubungan dengan pola makan di masa dewasa.
Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti yang muncul mengenai peran makanan sekolah dalam membangun sumber daya manusia masyarakat miskin. - Bukti yang terbatas namun menjanjikan tentang peran makanan sekolah sebagai jaring pengaman terhadap guncangan ekonomi

Sumber: World Bank 2024

Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam petunjuk teknis (juknis) program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum memiliki ketentuan yang jelas, terutama dalam hal pelaporan kendala, upaya perbaikan, serta pengukuran efektivitas program. Juknis tersebut juga tidak menjelaskan secara rinci data atau indikator intervensi yang perlu dipantau di lapangan, seperti status gizi penerima manfaat, potensi limbah makanan sisa, serta aspek keamanan dan kebersihan pangan. Ketidakjelasan indikator intervensi ini dapat berdampak pada sulitnya menilai

keberhasilan program MBG, khususnya dalam mengukur dampaknya terhadap perbaikan status gizi penerima manfaat.

Selain itu, tanpa indikator yang jelas, implementasi program MBG akan menghasilkan variasi data capaian yang sangat beragam, sehingga sulit untuk memperoleh basis data yang kuat dan dapat diandalkan. Ketidaktepatan dalam pengumpulan dan analisis data juga dapat mempengaruhi kebijakan berbasis bukti yang dibutuhkan untuk evaluasi dan pengembangan program di masa mendatang. Di luar tantangan dalam perencanaan serta ketersediaan indikator monitoring dan evaluasi, target utama pemerintah dalam program MBG masih berfokus pada peningkatan cakupan penerima manfaat secara signifikan. Berdasarkan dokumen yang sama, pemerintah menargetkan perluasan cakupan penerima manfaat dalam kurun waktu satu semester ke depan dengan rincian yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 3 Target Penerima Manfaat MBG TA. 2025

Bulan	Target Penerima Manfaat	Titik SPPG
Januari – Februari 2025	3 Juta	937 Titik SPPG
April 2025	6 Juta	2000 Titik SPPG
Juli 2025	17.5 Juta	5000 Titik SPPG

Sumber: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program MBG 2025

Hingga saat ini, belum ada studi maupun basis bukti yang menunjukkan urgensi perluasan target kelompok penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Dalam wawancara dengan media, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (2025), menyatakan bahwa pemerintah

menargetkan jumlah penerima manfaat MBG akan mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025. Pernyataan ini menunjukkan bahwa program MBG masih berorientasi pada pencapaian target kuantitatif tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kualitas dan efektivitas program. Selain itu, tidak terlihat adanya upaya untuk memastikan bahwa kelompok rentan dan yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas dalam implementasi program ini. Orientasi yang lebih menitikberatkan pada jumlah penerima manfaat berisiko mengabaikan aspek keberlanjutan serta dampak nyata program terhadap peningkatan gizi masyarakat.

Konsekuensi dari pendekatan yang lebih berorientasi pada kuantitas ini tidak hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga menimbulkan tantangan besar dalam hal pendanaan dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang efisien, program MBG berpotensi membebani anggaran negara secara signifikan. Hal ini terutama menjadi perhatian mengingat keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi berbagai sektor lain yang juga memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fokus program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih mengutamakan kuantitas penerima manfaat tanpa mempertimbangkan dampak, kualitas, dan efektivitas berisiko meningkatkan inefisiensi dalam implementasi program. Meskipun telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun, estimasi kebutuhan tambahan dana untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 mencapai Rp 100 triliun. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, pemerintah pusat

menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja negara guna menghemat anggaran hingga Rp 306 triliun. Dampak dari kebijakan ini dirasakan oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan yang harus melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 19 triliun (18% dari total Rp 105 triliun) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang harus memangkas hingga 80% atau sekitar Rp 81 triliun. Pemotongan anggaran ini berpotensi mempengaruhi program penguatan infrastruktur sanitasi, yang merupakan bagian penting dari intervensi sensitif dalam penanganan stunting.

Selain itu, pada 4 Februari 2025, Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian rincian alokasi transfer daerah, yang merupakan turunan dari Inpres 1/2025. Kebijakan ini mengatur pemangkasan dana transfer daerah hingga Rp 50 triliun, yang berdampak langsung pada pemerintah daerah. Studi kasus Pemerintah Kota Probolinggo menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi ruang fiskal APBD hingga Rp 62 miliar. Selain itu, sebanyak 413 kabupaten dan 93 kota telah mendapatkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk berkontribusi dalam program MBG melalui APBD, dengan target alokasi fiskal sebesar Rp 2,3 hingga Rp 2,5 triliun.

Tak hanya melalui APBD, alokasi dana desa sebesar Rp 20 triliun dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) juga akan difokuskan untuk mendukung program MBG. Pengalihan dana ini berpotensi menghambat program prioritas daerah lainnya, seperti pembangunan infrastruktur dasar, subsidi angkutan massal, dan pengembangan jaringan

transportasi publik. Ketimpangan pembangunan di tingkat daerah pun perlu diantisipasi, mengingat dana transfer pusat memiliki peran krusial dalam mendorong capaian pembangunan di daerah yang masih tertinggal.

Pergeseran prioritas anggaran ini sulit dihindari karena program MBG merupakan janji kampanye pemerintahan Prabowo-Gibran sejak pemilihan presiden. Namun, jika tidak dilaksanakan dengan prinsip teknokratis yang baik, program ini berisiko menjadi tidak efisien dan gagal mencapai dampak yang diharapkan.

Analisis terhadap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada periode implementasi 6-17 Januari 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kandungan gizi dalam menu yang disediakan dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Permenkes 28/2019. Menggunakan aplikasi Nutrisurvey, kami menemukan bahwa hanya 5 dari 29 menu (17%) yang memenuhi target 30-35% AKG energi harian. Perhitungan ini dilakukan dengan asumsi bahwa satu porsi menu mengandung dua satuan penukar sumber karbohidrat. Padahal, sesuai petunjuk teknis MBG, menu makan siang seharusnya memenuhi kecukupan kalori sebesar 30-35% AKG harian serta kebutuhan protein sebesar 33-36,4% bagi peserta didik jenjang SD kelas 4-6, SMP, dan SMA sederajat. Apabila konsumsi menu dengan kalori rendah berlangsung terus-menerus, maka dapat berdampak negatif pada performa akademik akibat kurangnya energi untuk beraktivitas.

Di sisi lain, analisis terhadap kandungan protein menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi asupan. Dari sampel yang terkumpul,

sebanyak 48% menu memiliki kandungan protein berlebih, 34% kurang, dan hanya 17% yang sesuai dengan target 33-36,4% AKG protein harian. Jika makanan dengan protein berlebih diberikan kepada penerima manfaat yang memiliki asupan protein rendah, maka hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Namun, jika diberikan kepada anak-anak dengan asupan protein yang sudah cukup atau berlebih, maka berisiko menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, seperti peningkatan risiko obesitas.

Selain ketidakseimbangan dalam kandungan energi dan protein, analisis juga menemukan bahwa 45% menu MBG masih mengandung pangan ultra-proses, khususnya produk susu kemasan berperisa yang tinggi gula. Hingga saat ini, petunjuk teknis MBG belum memasukkan pembatasan terhadap pangan ultra-proses, padahal keberadaan produk-produk ini telah terbukti berkontribusi terhadap tren peningkatan obesitas, hipertensi, dan penyakit tidak menular lainnya. Pangan ultra-proses juga diolah secara industri untuk menghasilkan rasa yang sangat nikmat (*hyper-palatable*), sehingga dapat meningkatkan keinginan konsumsi kalori yang lebih tinggi setelahnya. Selain itu, konsumsi pangan ultra-proses yang lebih praktis berpotensi menggantikan makanan tradisional yang minim pengolahan, padahal makanan tradisional umumnya lebih kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan.

Pemantauan media hingga 17 Januari 2025 menunjukkan adanya dua kasus keracunan makanan dalam minggu kedua pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu di Sukoharjo dan Nunukan Selatan. Untuk kasus di Nunukan

Selatan, penyelesaiannya dilakukan melalui proses yang tidak diketahui secara jelas, namun akhirnya disimpulkan bahwa tidak terjadi keracunan makanan. Kejadian ini menyoroti potensi risiko dalam implementasi MBG, khususnya dalam aspek keamanan pangan.

Salah satu faktor yang dapat berkontribusi terhadap insiden tersebut adalah minimnya penerapan prinsip Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam program MBG. HACCP merupakan sistem manajemen risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi bahaya terkait keamanan pangan di seluruh rantai nilai pangan, mulai dari penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Sayangnya, berdasarkan petunjuk teknis yang tersedia, terlihat bahwa MBG belum mengatur secara komprehensif mengenai kebersihan dan keamanan pangan, termasuk prosedur penyimpanan, pengolahan, penyaluran, serta manajemen limbah makanan. Kurangnya regulasi dalam aspek ini berisiko meningkatkan kejadian serupa di masa mendatang, sehingga diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan kontrol kualitas pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Di berbagai daerah, struktur Sentra Pengolahan Pangan Gotong Royong (SPPG) dalam program MBG hanya melibatkan satu ahli gizi. Padahal, keterlibatan ahli gizi sangat krusial di seluruh tahapan rantai nilai pengolahan pangan di SPPG. Peran mereka tidak hanya terbatas pada perencanaan dan penyesuaian menu, tetapi juga mencakup pemetaan risiko serta pemantauan standar kebersihan dan keamanan pangan. Dengan kapasitas produksi yang diekspektasikan mencapai

3.000–3.500 porsi makanan per hari di setiap SPPG, keterbatasan jumlah ahli gizi dapat berdampak pada kualitas gizi makanan yang disajikan serta efektivitas pengawasan keamanan pangan.

Minimnya pemenuhan gizi dalam menu MBG, ditambah dengan kejadian keracunan makanan di dua area implementasi program, menunjukkan perlunya penjaminan kualitas yang lebih baik. Sebagai perbandingan, dalam program free school meals di berbagai negara, ahli gizi memiliki peran yang lebih luas, mencakup perencanaan menu, monitoring pengolahan makanan, pelatihan juru masak dan tenaga operasional, serta edukasi tentang makanan dan gizi di sekolah. Di Jepang, misalnya, sekolah yang menyediakan makanan untuk lebih dari 550 siswa diwajibkan memiliki setidaknya satu ahli gizi. Sementara itu, di Brasil, jumlah ahli gizi dalam program makan gratis di sekolah meningkat sebesar 23,7% dalam dua tahun pertama implementasi. Model pelibatan ahli gizi yang lebih komprehensif seperti ini dapat menjadi referensi bagi program MBG agar tidak hanya berorientasi pada cakupan penerima manfaat, tetapi juga pada kualitas dan keamanan pangan yang disediakan. (CISDI, 2025).

Untuk memastikan keberhasilan program MBG, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pemerintah harus menetapkan indikator status gizi sebagai dasar penentuan luaran program agar implementasi dapat berjalan sesuai target. Selain itu, pendekatan berbasis data, seperti yang diterapkan dalam program Percepatan Penurunan Stunting (PPS), dapat menjadi referensi dalam menentukan lokasi prioritas dan

alokasi sumber daya. Analisis cost-effectiveness juga diperlukan guna memastikan transparansi serta efisiensi penggunaan anggaran, sehingga program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal.

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan para ahli, dalam perencanaan dan evaluasi MBG juga menjadi faktor kunci dalam penyempurnaan tata kelola program. Pemerintah perlu menyediakan kanal aduan publik yang terintegrasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menampung keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian prosedur maupun kualitas menu yang disajikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan MBG dapat menjadi program yang lebih transparan, akuntabel, serta berdampak nyata dalam meningkatkan status gizi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Dengan adanya tantangan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan MBG, regulasi yang lebih kuat serta mekanisme tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan program ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera merancang kebijakan yang lebih komprehensif guna memastikan bahwa MBG dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berdampak nyata dalam meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia.

Masalah gizi, khususnya pada ibu hamil, balita, dan anak sekolah, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Angka stunting dan kurang gizi yang cukup tinggi menunjukkan perlunya intervensi konkret dari pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Program Makan

Bergizi Gratis (MBG), berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis dalam upaya memperbaiki kualitas gizi nasional dan menurunkan angka stunting di Indonesia.

Permasalahan stunting masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Meskipun sebagai ibu kota dengan akses fasilitas kesehatan dan pangan yang lebih baik dibandingkan wilayah lain, masih terdapat kasus stunting dan kurang gizi yang memerlukan perhatian khusus. Ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi di kelompok masyarakat tertentu, serta pola asuh dan edukasi gizi yang belum optimal menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di wilayah ini. Oleh karena itu, berbagai intervensi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyoar ibu hamil, balita, serta kelompok rentan lainnya. Implementasi program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di DKI Jakarta.

Tabel 1. 4 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi DKI Jakarta

Wilayah	Kab. Kepulauan Seribu	Kota Jakarta Barat	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	Kota Jakarta Timur	Kota Jakarta Selatan	Kota Jakarta Pusat
Angka	20.5	15.2	18.5	14.8	14.4	11.9	14.0

Sumber: Status Gizi Indonesia 2022

Di Jakarta, implementasi Program MBG untuk ibu hamil dijadwalkan mulai pada 9 Januari 2025, sebagaimana disampaikan oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup selama masa kehamilan guna mendukung pertumbuhan janin dan mengurangi risiko malnutrisi. Pelaksanaan program ini akan dilakukan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berperan dalam mendistribusikan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita di setiap daerah.

Dalam mekanismenya, terdapat dua skema penyaluran makanan bagi ibu hamil: (1) pengantaran langsung ke rumah oleh kader Posyandu, dan (2) pengambilan mandiri oleh ibu hamil di Posyandu terdekat. Namun, bagi ibu dengan kondisi kehamilan besar yang memiliki keterbatasan mobilitas, metode pengantaran ke rumah menjadi prioritas. Program ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan dan aktivasi kembali Posyandu di seluruh Indonesia agar lebih berperan aktif dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Program Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara serentak sejak 6 Januari 2025 di 190 titik di 26 provinsi dan ditargetkan menjangkau tiga juta penerima manfaat hingga Maret 2025. Penerima manfaat tersebut mencakup balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui. Pemerintah menargetkan cakupan program ini terus meningkat secara bertahap hingga

mencapai 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025, dan pada tahun 2029, diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Dengan skala yang luas dan target yang ambisius, keberhasilan implementasi Program MBG bagi ibu hamil sangat bergantung pada efektivitas regulasi, koordinasi antar sektor, serta peran aktif tenaga kesehatan dan kader Posyandu. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap tata kelola, mekanisme distribusi, serta efektivitas program ini dalam meningkatkan status gizi ibu hamil dan mencegah stunting pada generasi mendatang.

Dari berbagai paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan gizi, khususnya stunting, masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Meskipun berbagai program intervensi telah diterapkan, masih terdapat kendala dalam akses pangan bergizi, ketimpangan ekonomi, serta efektivitas implementasi kebijakan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak sebagai kelompok rentan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas regulasi, pengawasan distribusi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi MBG di DKI Jakarta, guna mengevaluasi efektivitasnya dalam menurunkan angka stunting serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan yang disajikan dalam pendahuluan, masalah masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum adanya detail standar kebersihan, keamanan pangan, pengemasan, serta distribusi makanan dalam pelaksanaan MBG terjadi karena regulasi yang tersedia saat ini masih terbatas pada Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 yang hanya mengatur petunjuk teknis operasional MBG.
- b. Keterbatasan jumlah ahli gizi di Sentra Pengolahan Pangan Gotong Royong (SPPG) menghambat kualitas pengawasan dan penyesuaian gizi menu
- c. Dominasi BGN dalam implementasi MBG mengurangi keterlibatan optimal kementerian lain maupun pemerintah daerah.
- d. Kurangnya keterbukaan dalam penyediaan informasi publik yang ditunjukkan oleh Dokumen petunjuk teknis (juknis) MBG tidak diunggah di kanal resmi Badan Gizi Nasional (BGN) dan hanya ditemukan melalui situs berbagi dokumen. Beberapa pemerintah daerah belum siap karena minim sosialisasi, belum ada juknis detail, dan keterbatasan kapasitas teknis
- e. Hanya sebagian kecil menu MBG (17%) yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian.
- f. Kebutuhan dana tambahan hingga Rp 100 triliun berpotensi membebani APBN dan memotong program prioritas lain.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi dari Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis di wilayah Kota Jakarta Selatan: Studi Kasus Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan?
- b. Dalam keberjalanan dari Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis di wilayah Kota Jakarta Selatan: Studi Kasus Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan, faktor faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dari keberjalanan Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis bagaimana implementasi dari Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis di wilayah Kota Jakarta Selatan: Studi Kasus Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan
- b. Menganalisis faktor faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam keberjalanan dari Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis di wilayah Kota Jakarta Selatan: Studi Kasus Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Toritis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Publik dan juga yang perlu menjadi fokus adalah pada kebijakan yang berfokus pada dunia pendidikan.

Selain itu juga, penelitian ini diharapkan, dapat dijadikan sebagai pengembangan suatu penelitian, yang meneliti terkait efektivitas program pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, khususnya bagi para pemangku kebijakan dan pelaksana program di tingkat pusat maupun daerah. Melalui studi kasus pada Posyandu di wilayah Kota Jakarta Selatan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Kabinet Prabowo-Gibran, khususnya dalam menurunkan angka stunting.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Avrina Dwijayanti / 2024	Menganalisis dampak kebijakan makan siang bergizi gratis yang dirancang oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap sektor pertanian di Indonesia, khususnya dari perspektif efek spillover.	Policy spillover merujuk pada dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan di suatu sektor atau area yang mempengaruhi sektor atau area lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung (Moffitt et al., 2024; Orsini & Smith, 2023).	Metode Deskriptif Kualitatif	Kebijakan yang mendorong penggunaan bahan pangan lokal memiliki potensi besar dalam memperkuat pasar petani, meningkatkan pendapatan mereka, serta mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan. Namun, terdapat risiko ketergantungan terhadap kebijakan ini, terutama jika terjadi perubahan anggaran atau kebijakan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi petani. Oleh karena

					<p>itu, diperlukan perencanaan kebijakan yang matang serta dukungan infrastruktur yang memadai agar manfaat program ini dapat berkelanjutan. Selain itu, strategi diversifikasi pasar dan peningkatan kapasitas petani menjadi langkah penting dalam mitigasi risiko ketergantungan terhadap program ini. Dari perspektif teoritis, studi ini menyoroti pentingnya spillover kebijakan, yang menunjukkan keterhubungan antara sektor pertanian dan pendidikan dalam mendukung</p>
--	--	--	--	--	---

					pembangunan ekonomi pedesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2	Ajeng Atikah Merlinda, Yusmar Yusuf / 2025	Bertujuan untuk menganalisis Program Makan Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada strategi peningkatan motivasi belajar siswa di sekolah	Teori Solidaritas Sosial yang dikemukakan oleh Émile Durkheim menekankan bahwa pendidikan berperan penting dalam membangun solidaritas sosial dan mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Durkheim membedakan dua bentuk solidaritas sosial, yaitu solidaritas mekanik yang terjadi dalam masyarakat tradisional dengan kesamaan nilai dan kepercayaan, serta	Metode Kualitatif	Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Dengan keterlibatan berbagai pihak dan dukungan yang luas, program ini memiliki potensi untuk menjadi model kebijakan kesehatan dan pendidikan yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang lainnya

			<p>solidaritas organik dalam masyarakat modern yang bergantung pada spesialisasi dan diferensiasi peran (Durkheim, 1893). Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana program pendidikan dan kebijakan makan bergizi gratis dapat memperkuat keterpaduan sosial serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat.</p>		
3	Kevin Andreas Halomoan Tambunan,	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program makan bergizi ini berjalan di SMK	<p>Program Makanan Bergizi Gratis</p> <p>Program makan bergizi gratis ini merupakan</p>	Metode Deskriptif Kualitatif	Program ini meningkatkan kehadiran siswa dan membantu mereka makan dengan baik, terutama bagi

<p>Ridha Nababan, Rimma Anisa Siagian, Roslin Naiborhu, Sintia Harianti, Jamaludin Jamaludin / 2025</p>	<p>Negeri 6 Medan dalam masa uji coba, serta dampaknya bagi hasil belajar siswa dan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya</p>	<p>rencana pembagian makan bergizi di sekolah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dalam pendidikan karena semua siswa memiliki kesempatan untuk makan makanan bergizi secara gratis. Yang merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam masa jabatannya (Andin et al., 2025). Tujuan program ini adalah untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya</p>	<p>siswa yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Meskipun demikian, dampak terhadap hasil belajar masih memerlukan evaluasi dalam jangka panjang. Pendistribusian makanan, pengelolaan sampah, dan kualitas makanan adalah beberapa tantangan dalam implementasi. Dukungan dari guru, OSIS, dan pihak sekolah membantu program berjalan dengan lancar. Untuk memastikan program ini berhasil dan</p>
---	---	---	--

			<p>anak-anak dan ibu hamil. Ini akan membantu meningkatkan fokus semua siswa pada pembelajaran tanpa memandang status ekonomi atau sosial mereka (Ajeng Atikah Merlinda, 2025). Status gizi yang ideal juga penting untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.(Desiani & Syafiq, 2025). Produktivitas Belajar menurut Slameto (Suarim & Neviyarni, 2021) belajar adalah upaya seseorang untuk mengubah tingkah lakunya secara keseluruhan sebagai hasil dari</p>		<p>berkelanjutan di masa mendatang, evaluasi dan peningkatan sistem diperlukan.</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Trianto (Suarim & Neviyarni, 2021) mendefinisikan belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan, perkembangan tubuh, atau karakteristik seseorang sejak lahir.</p>		
4	Beni Rahmatullah, Suwanda Aditya Saputra, Pungkas	Melakukan analisis sentimen terhadap ulasan dan komentar masyarakat mengenai program makanan bergizi gratis.	<p>Algoritma Naive Bayes</p> <p>Metode klasifikasi yang didasarkan pada Teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Metode ini sering</p>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis sentimen aplikasi Skorelife pada komentar di youtube akun sekretariat negara menggunakan

	Budiono, Dikdik Permana Wigandi / 2025		digunakan dalam analisis teks, termasuk analisis sentimen, karena kemampuannya dalam menangani data besar, akurasi dan kecepatan dalam proses klasifikasi (L. Zhang and Z. Zhou, "Sentiment analysis of movie reviews using Naive Bayes classifier," International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 2020.)		Algoritma Naive Bayes Memiliki tingkat akurasi 84.69%, nilai recall 53.73%, dan nilai auc0.525. Kesimpulan dari proses yang telah dilakukan adalah bahwa sentiment negative lebih dominan daripada sentimen positif
5	Ajeng Atikah Merlinda, Yusmar Yusuf / 2025	Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak program terhadap	Metode analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk terdiri dari tiga dimensi	Kualitatif	Secara keseluruhan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya meningkatkan

		motivasi belajar siswa serta implikasinya dalam konteks pendidikan di Indonesia	utama yang saling terkait, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial		kesehatan anak-anak tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Dengan keterlibatan berbagai pihak dan dukungan yang luas, program ini memiliki potensi untuk menjadi model kebijakan kesehatan dan pendidikan yang dapat diterapkan di negara-negara berkembang lainnya
6	Juliana F. W. Cohen, Amelie A. Hecht, Gabriella M. McLoughlin,	Menilai dampak kebijakan makan gratis sekolah (Universal School Meals) terhadap partisipasi siswa,	Teori School Nutrition Policy yang menyatakan bahwa akses makanan bergizi di sekolah memengaruhi kesehatan	Systematic Riview	Program makan sekolah gratis meningkatkan partisipasi makan di sekolah, kualitas pola makan, ketahanan pangan keluarga, dan prestasi akademik tanpa

	Lindsey Turner, & Marlene B. Schwartz (2021)	kualitas gizi, prestasi akademik, ketahanan pangan, dan status gizi.	dan hasil belajar peserta didik.		meningkatkan risiko obesitas secara signifikan.
7	Juliana F. W. Cohen, Amelie A. Hecht, Erin R. Hager, Lindsey Turner, Kara Burkholder, & Marlene B. Schwartz (2021)	Mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk meningkatkan konsumsi makanan sehat dalam program makan sekolah.	Pendekatan behavioral nutrition dan school food environment, yang menekankan pentingnya lingkungan sekolah dalam membentuk perilaku makan anak.	Systematic Riview	Intervensi seperti peningkatan kualitas menu, waktu makan yang cukup, serta penyajian makanan yang menarik terbukti meningkatkan konsumsi makanan sehat oleh siswa.
8	Spill, Cash, Chatterjee, dkk. (2024)	Menganalisis pengaruh program Universal Free School Meals (UFSM)	School Nutrition Policy dan Food Security Theory, yang menjelaskan bahwa	Systematic Riview	Program makan sekolah gratis meningkatkan partisipasi siswa dalam

		terhadap kesehatan, ketahanan pangan, prestasi akademik, dan kesejahteraan siswa.	penyediaan makanan bergizi di sekolah meningkatkan akses pangan, kesehatan, dan kemampuan belajar siswa.		program makan sekolah, memperbaiki kualitas konsumsi pangan, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, serta memberikan dampak positif terhadap kehadiran dan prestasi akademik siswa.
9	Raveenthiranathan, Ramanarayanan, & Thankappan (2024)	Mengevaluasi dampak program makan siang gratis (Mid-Day Meal Programme) terhadap status gizi dan hasil belajar anak sekolah di India.	Human Capital Theory, yang menyatakan bahwa investasi pada gizi dan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.	Systematic Riview	Program makan siang gratis terbukti meningkatkan status gizi, menurunkan angka kekurangan gizi, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, serta memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar meskipun efektivitasnya berbeda antarwilayah.

10	Lane, Yoong, Nathan, dkk. (2024)	Menilai efektivitas kebijakan dan intervensi lingkungan pangan sekolah dalam meningkatkan kesehatan serta perilaku konsumsi anak.	School Food Environment Framework, yang menjelaskan bahwa lingkungan sekolah berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi makanan sehat pada anak.	Systematic Riview	Kebijakan penyediaan makanan sehat di sekolah mampu meningkatkan konsumsi buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta memberikan dampak positif terhadap kesehatan siswa.
----	----------------------------------	---	--	-------------------	--

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi merupakan suatu upaya secara menyeluruh terhadap segala aktivitas yang berjalan di dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut (*goals and objectives*). Publik merupakan beberapa orang yang sama dalam hal berpikir, menyalurkan perasaannya, harapan, sikap, dan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku (dalam Pasolong, 2014 :6).

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (1988: 29-30) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi Publik ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memecahkan masalah masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Kemudian menurut Menurut Dimock dan Dimock (1992:19), administrasi publik merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari salah satu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-bangsa disusun,digerakkan,dan dikemudikan. Hal ini menunjukkan sangat kental tentang manajerial. Dimana berhubungan dengan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi. Kemudian yang paling bertanggung jawab atas hal ini tentunya adalah pemerintah di dalam reformasi birokrasi.

Hal yang disampaikan oleh Osborne yaitu :

- a. Lebih mengarahkan daripada melaksanakan (katalisator)
- b. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat (fasilitator)
- c. Menyuntikkan persaingan yang sehat (motivator)
- d. Menghasilkan daripada membelanjakan (entrepreneur)
- e. Public governance: alokator, distributor, stabilisator public goods.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah Kerjasama 1 Lembaga atau antar pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam melayani kebutuhan publik secara efektif.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Paradigma menjabarkan konsep yang diterapkan para ahli dalam memaparkan suatu kondisi akan perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sudut pandang ilmu pengetahuan dengan tujuan melakukan penganalisisan suatu peristiwa sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Paradigma Administrasi Publik yang berjumlah 6 dijelaskan di bawah ini;

Paradigma 1 (1900-1926) nama lainnya disebut dengan paradigma dikotomi antara politik dan Administrasi Publik. Tokoh dalam Paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow tulisannya yang berjudul “*Politics and Administration*” pada Tahun 1900. Berisikan bahwa politik harus berfokus pada kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan administrasi akan mengamati pengimplementasian kebijakan tersebut. Pada paradigma ini ditekankan government bureaucracy.

Paradigma 2 (1927-1937) nama lainnya disebut dengan Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi . Tokoh dalam Paradigma ini adalah Willoughby, Gullick, dan Urwick. Pada Paradigma ini prinsip yang dihasilkan disebut POSDCORB (*Planing, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*). Pada paradigma ini terpaparkan fokus administrasi publik yang merupakan fungsi serta prinsip manajemen, sedangkan pemaparan lokus tidak terpapar secara rinci, Sehingga yang lebih ditekankan adalah fokus administrasi.

Paradigma 3 (1950-1970) nama lainnya disebut dengan Paradigma Administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik. Adanya perdebatan antara pemisahan Politik dan Administrasi sebagai suatu yang tidak realistis, Melalui paradigma inilah yang kemudian menjadikan administrasi publik sebagai suatu ilmu politik yang memiliki lokus pada birokrasi pemerintahan dan sifat fokus yang abstrak karena prinsip dari administrasi publik memiliki banyak kekurangan. Paradigma ini menyatakan kaitan erat antara administrasi publik

dengan politik, terlihat pada fokus administrasi publik yang abstrak karena imbas dari dominannya disiplin politik dengan prinsip administrasi. Birokrasi pemerintah-lah yang kemudian menjadi lokus di dalam paradigma ini.

Paradigma 4 (1956-1970) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya sebagai fokus dari paradigma ini.

Paradigma 5 (1970-Sekarang) Paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus dari paradigma ini adalah teori organisasi, kebijakan publik, dan teori manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan masalah publik.

Paradigma 6 (1990-Sekarang) nama lainnya disebut dengan Paradigma *Governance*. Paradigma *governance* berkaitan erat dengan NPM (yang diyakini berhasil), desentralisasi fungsi pemerintahan (GG), manajemen kinerja, orientasi *users* dan *result*, aktor non pemerintah (NPM). Dengan adanya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* yang menekankan pada kesetaraan dan kerja sama yang seimbang antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil, muncul visi atau paradigma baru administrasi publik yang disebut *good governance*.

Penelitian ini termasuk ke dalam Paradigma 6 yakni Paradigma *Governance*. Dalam Paradigma *Governance* karena terdapat kolaborasi atau kerjasama yang seimbang antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan kritikan sekaligus yang menjadi bahan uji coba Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah sehingga nantinya Masyarakat pun yang merasakan dampaknya secara langsung

1.6.4 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang ditujukan memberikan jawaban atas persoalan persoalan politik yang saat itu dipandang tidak bisa diaplikasikan karena terlalu teoritis atau tidak sesuai dengan human behavior. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan ilmu mempunyai kaitan erat dengan ilmu politik dan pemerintahan, yang secara spesifik menjadi bagian dari hasil ilmu Administrasi Publik, dimana kebijakan tersebut dipergunakan untuk menciptakan keputusan keputusan yang didasarkan pada kepentingan publik. Keputusan yang dimaksud berupa solusi atas permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat.

Thomas Dye mendefinisikan kebijakan politik sebagai pilihan pemerintahan untuk melaksanakan kebijaksanaan ataupun tidak melaksanakan kebijaksanaan (public policy is whatever government choose to do or not to do) (Riant Nugroho, 2008). Konsep dari Dye kompleks dikarenakan kebijakan

publik meliputi hal yang dilaksanakan maupun tak dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. James Anderson (Subarsono, 2012:2) menyatakan bahwa kebijakan publik kebijaksanaan oleh para aparatur pemerintah telah disepakati. Meskipun secara sadar kebijakan publik bisa dipengaruhi oleh aktor maupun pengaruh eksternal dari lingkup pemerintah. Konteks dari kebijakan publik bisa dipahami sebagai kebijakan yang dibuat dan dipilih aparatur pemerintah. Riant Nugroho (2008) menyatakan ada ciri dari kebijakan publik adalah suatu yang dapat dipahami, sebab maksudnya hal yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan dan serta sesuatu yang dapat diukur, sebab ukurannya jelas yaitu dengan melihat perkembangan pencapaian tujuan sudah dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan mengenai kebijakan publik diatas, ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik pilihan dari pemerintah yang mudah dipahami untuk memecahkan permasalahan publik. Dalam membuat kebijakan, pemerintah akan melalui beberapa tahapan terlebih dahulu mulai dari merumuskan hingga pada akhirnya melaksanakan kebijakan itu sendiri.

1.6.5 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mencapai hasil. Implementasi merujuk pada implementasi kebijakan publik yang dirumuskan dan diadopsi dengan menggunakan infrastruktur yang ada untuk mencapai tujuan. Salah satu tahapan yang menjadi fokus kebijakan publik

adalah implementasi kebijakan yang mana beberapa unit administratif dimobilisasi dengan sarana dan sumber daya yang tersedia. Implementasi merupakan langkah penting karena tanpa implementasi maka kebijakan tidak akan berjalan. Selain itu, pelaksanaan juga berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan melalui penilaian dari pihak-pihak yang terlibat.

Pada tahun 1970-an, implementasi kebijakan mulai serius mempertimbangkan penerapan kebijakan dengan menggunakan pendekatan top-down sebagai titik awal. Pendekatan ini berasumsi bahwa keputusan yang diambil adalah alternatif terbaik dan bahwa implementasi merupakan aspek penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi diartikan sebagai penentuan tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Pendekatan top-down ini juga mengasumsikan bahwa kegagalan kebijakan harus dianalisis penyebabnya dengan membangun rantai hubungan sebab-akibat yang dimulai dari kebijakan itu sendiri. Adapun model pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Merilee S. Grindle (1980)

Proses penerapan suatu kebijakan dapat dilaksanakan saat tujuan dan sasaran ditetapkan, ketika program dirancang, atau ketika sumber daya dialokasikan untuk mencapai suatu tujuan. Keputusan untuk menyusun atau tidak menyusun suatu kebijakan dan bentuknya mempengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil. Lebih lanjut Grindle menegaskan bahwa ada dua aspek yang memberikan pengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yakni

konten dan konteks yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan dan capaian keberhasilannya ditentukan oleh tiga bagian sumber daya.

- a. *Content of Policy* (Isi Kebijakan) Isi kebijakan dan program sangat mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Kebijakan yang sulit dilaksanakan seringkali menghadapi reaksi negatif, penolakan, atau perlawanan dari kelompok sasaran dan pelaksana. Kebijakan kontroversial, tindakan yang tidak populer, atau perubahan besar dapat menjadi tantangan signifikan dalam proses implementasi. Menurut Grindle, indikator isi kebijakan mencakup antara lain:

- i. Kepentingan Kelompok Sasaran (*Target Groups*) yang Dipengaruhi Program

Kebijakan yang diimplementasikan akan menghadapi perlawanan dari berbagai pihak yang dirugikan oleh kebijakan tersebut, sehingga mempengaruhi proses implementasinya. Program atau langkah pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan hubungan sosial, politik, dan ekonomi biasanya akan mendapat penolakan

dari kelompok masyarakat yang merasa posisinya terancam.

ii. Jenis Manfaat

Kebijakan yang menghasilkan manfaat bagi sebagian besar atau seluruh lapisan masyarakat akan lebih mudah diimplementasikan. Manfaat kolektif ini mendorong pelaksanaan kebijakan karena kelompok sasaran akan mendukung kebijakan yang menyelesaikan masalah utama yang menyangkut kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan segelintir orang. Oleh karena itu, kebijakan dengan manfaat luas akan lebih mudah diimplementasikan

iii. Perubahan yang Diinginkan

Derajat dan jangkauan perubahan mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Semakin besar skala dan kuat keinginan pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan, semakin sulit implementasinya. Hal ini karena perubahan

harus melibatkan berbagai sektor masyarakat dan skala besar memerlukan biaya serta waktu yang signifikan. Selain itu, perubahan yang diinginkan seperti adopsi teknologi, perubahan perilaku, dan pencapaian tujuan jangka panjang memerlukan adaptasi yang besar serta partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk berhasil.

iv. Kedudukan Pengambil Keputusan

Penyebaran pengambil keputusan secara geografis atau organisasional dapat membuat implementasi kebijakan menjadi lebih rumit. Hal ini terjadi karena implementor harus membangun jaringan yang sesuai dengan struktur organisasi. Kondisi ini juga membuat unit pengambil keputusan bersifat multi-level, sehingga memperumit proses implementasi kebijakan.

v. Pelaksana Program

Keberhasilan pelaksanaan program akan meningkat jika pelaksana memiliki keterampilan yang memadai dan dukungan

yang diperlukan. Keahlian pelaksana sangat menentukan kesuksesan program, terutama jika pelaksana adalah seorang ahli yang berkomitmen tinggi, mendapat dukungan luas, dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan.

vi. Sumber Daya Yang Digerakan

Ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya sesuai kebutuhan akan memudahkan implementasi kebijakan. Sinergi sumber daya diperlukan untuk menyelaraskan implementasi dengan tujuan.

- b. Lingkungan Implementasi (*Context of Policy*) Konteks implementasi mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan, karena pelaksana memiliki karakter yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagai individu, pelaksana memiliki keyakinan, cita-cita, dan kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi implementasi. Oleh karena itu, ada kemungkinan kebijakan menyimpang dari tujuan awal karena kepentingan pribadi. Grindle menjelaskan bahwa konteks implementasi yang mempengaruhi keberhasilan meliputi: Kekuasaan,

kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Hal ini merujuk pada praktik politik yang ada. Jika kekuasaan politik merasa memiliki kepentingan untuk program tersebut, mereka akan menyusun sebuah strategi untuk memenangkan persaingan, dan kepentingan tersebut bergantung pada faksi yang memimpin program tersebut. Akibatnya, hasilnya cenderung untuk kepentingan politik, bukan kepentingan bersama. Namun, implementasinya bersifat berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, sehingga para pihak memiliki peran kunci dalam proses implementasi saat mengambil keputusan kebijakan. Karakteristik lembaga pemimpin Karakteristik lembaga dan pemimpin memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Ini terlihat dari strategi penyelesaian konflik yang diterapkan selama proses pelaksanaan. Kepatuhan dan daya tangkap Respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan dan implementasinya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Daya tangkap dan kepatuhan pelaksana menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Bagaimana mereka memperjuangkan dan mengakomodasi kepentingan menunjukkan kepatuhan mereka. Responsivitas

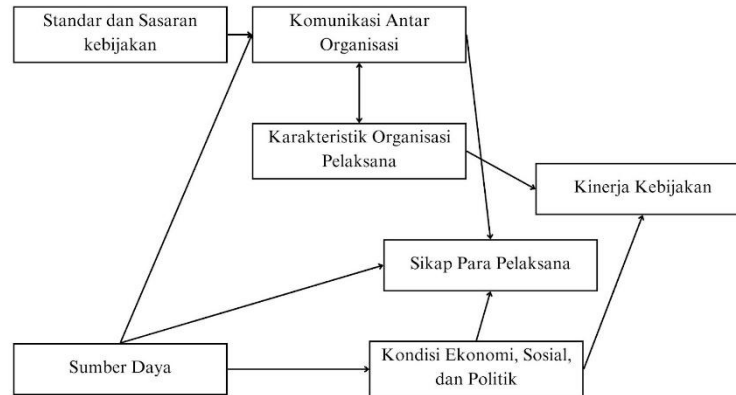
lembaga publik juga penting untuk menambah informasi dan mengevaluasi pencapaian program kebijakan.

2) Van Meter Van Horn (1975) Proses implementasi yang menekankan peran penting dan partisipasi implementor dalam merumuskan tujuan kebijakan (Anggara, 2018, hlm. 242). Model ini mengemukakan bahwa variabel-variabel bebas yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Variabel-variabel tersebut meliputi (Anggara, 2018, hlm. 242-243):

- a. Standar dan sasaran kebijakan Mencakup sasaran kebijakan yang ingin dicapai serta standar yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya. Standar ini penting sebagai pedoman pelaksanaan agar kebijakan berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan pelaksanaan yang optimal.
- b. Sumber daya Dalam proses implementasi sumber daya termasuk anggaran menjadi pendukung keberhasilan pelaksanaannya.
- c. Karakteristik organisasi pelaksana Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana, yang mencakup tingkatan mengontrol pada unit bawah saat implementasi, kompetensi dan ukuran agen pelaksana, hubungan resmi dan tidak resmi dengan pembuat kebijakan, serta dukungan politik dari legislatif maupun eksekutif.

- d. Komunikasi antar organisasi Variabel ini mempengaruhi implementasi kebijakan. Mekanisme kelembagaan yang memerlukan pengawasan dari tingkat yang lebih tinggi menjamin bahwa implementasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga memperkuat kesuksesan kebijakan.
- e. Sikap para pelaksana Sikap pelaksana kebijakan mempengaruhi proses implementasi mencakup pengetahuan maupun pemahaman isi dan tujuan kebijakan, serta intensitas sikap implementor terhadap kebijakan. Sikap ini menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik Variabel ini memperhatikan beberapa faktor termasuk dukungan sumber daya ekonomi, dampak kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, tanggapan politisi, dan dukungan elite terhadap kebijakan yang dirumuskan.

Gambar 1. 4 Model Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn



Sumber: Anggara, 2018 hal. 243

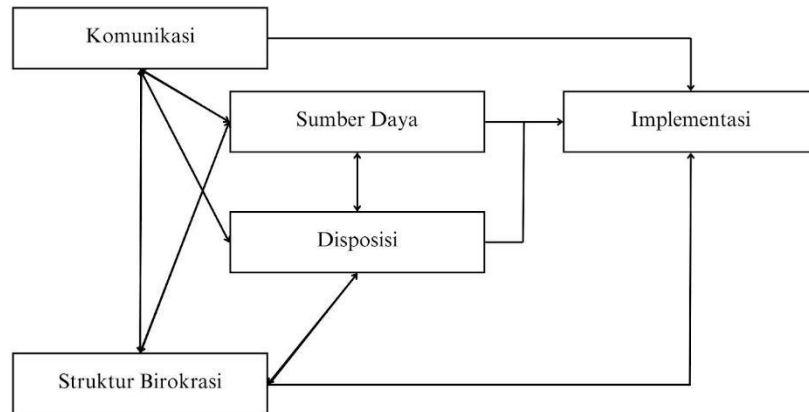
3) Edwards III Model implementasi menurut Edwards III dikenal sebagai pendekatan masalah implementasi. Edwards menyatakan bahwa model ini memiliki 4 faktor krusial yang dapat mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keempat faktor meliputi:

- a. Komunikasi Komunikasi memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi. Komunikasi yang lemah dapat menghambat proses implementasi. Intensitas komunikasi kebijakan publik diperlukan agar komitmen dan dukungan dari pihak terkait terbentuk dan mendukung keberhasilan implementasi. Indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik:

- i. Transmisi Kebijakan harus disampaikan kepada pejabat atau aktor yang nantinya mengimplementasikannya. Masalah transmisi kerap kali terjadi ketika pelaksana menentang kebijakan atau terdapat struktur birokrasi berlapis dan saluran komunikasi yang kurang memadai.
- ii. Kejelasan (*clarity*) Kejelasan tujuan dan metode mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam implementasi. Alasan kebijakan sering tidak dirumuskan dengan jelas termasuk kerumitan pembuatan kebijakan, oposisi masyarakat, tujuan yang saling bersaing, dan perumus yang belum sepenuhnya menguasai masalah. Konsistensi Konsistensi dalam komunikasi sangat penting untuk implementasi kebijakan. Semakin konsisten komunikasinya, semakin jelas proses implementasinya. Penghambat konsistensi kebijakan termasuk kompleksitas kebijakan, kesulitan memulai implementasi, keragaman sasaran dan tujuan, konflik dengan kebijakan yang lain, dan pengaruh kelompok kepentingan.

- b. Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dicapai apabila terdapat sumber daya yang mencakup:
 - i. Staf, mencakup jumlah dan kemampuannya.
 - ii. Informasi, mencakup cara melaksanakan kebijakan.
 - iii. Kewenangan yang diperlukan bagi pelaksana
 - iv. Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan policy.
- c. Disposisi Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus diimplementasikan. Tiga unsur utama yang memengaruhi disposisi adalah:
 - i. Kognisi, yaitu pemahaman pelaksana terhadap isis kebijakan
 - ii. Respons, yaitu apakah pelaksana menerima atau menolak kebijakan
 - iii. Intensitas response dari implementer
- d. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi merujuk pada prosedur kerja dalam pelaksanaan kebijakan. SOP (Standar Operasional Prosedur) sangat penting, terutama ketika pelaksana melibatkan lebih dari satu institusi.

Gambar 1. 5 Model Implementasi kebijakan Edwards III



Sumber: Anggara, 2018 hal. 250

4) Mazmanian dan Sabatier (1983) Model implementasi dikenal dengan sebutan A Frame Work for Implementation Analysis. Menurut model ini, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga faktor utama (Anggara, 2018, hlm. 739-741). Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Karakteristik Masalah

- i. Tingkat kesukaran teknis dan karakteristik permasalahan yang dihadapi
- ii. Tingkat keberagaman kelompok sasaran
- iii. Proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah populasi
- iv. Derajat dan luasnya perubahan yang diinginkan

b. Karakteristik Kebijakan

- i. Kejelasan dan kecermatan kebijakan

- ii. Dukungan teoretis untuk kebijakan
 - iii. Alokasi dana atau kemampuan finansial
 - iv. Dukungan dan kerjasama antar institusi pelaksana
 - v. Konsistensi peraturan
 - vi. Komitmen pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan
 - vii. Aksesibilitas pihak luar
- c. Lingkungan Kebijakan
- i. Kondisi sosial, ekonomi, dan penguasaan teknologi
 - ii. Dukungan masyarakat
 - iii. Sikap dan sumber daya konstituen
 - iv. Komitmen dan kepemimpinan SDM kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dan pendapat pakar implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagai tahap penting dalam proses kebijakan berupa penggerakan sarana prasarana dan pelaksana agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini menerapkan model implementasi oleh Van Meter Van Horn yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi serta mengurutkannya dengan menjabarkan bagaimana keputusan/decision dibuat oleh para pelaksana kebijakan. Teori ini dipengaruhi oleh keenam variabel yang nantinya bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi kebijakan

Kemudian, akan diidentifikasi dan dianalisis faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

1.6.6 Makan Bergizi Gratis

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 secara resmi menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat strategis dalam melaksanakan pemenuhan gizi nasional di Indonesia. Salah satu program unggulan yang digagas oleh lembaga ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk menjawab tantangan ketahanan gizi, khususnya dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program MBG ini menyoar kelompok-kelompok rentan, yaitu anak usia sekolah, anak di bawah usia lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui, yang dinilai membutuhkan intervensi gizi secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional memiliki struktur kelembagaan yang terdiri atas empat deputi pelaksana, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dan saling melengkapi.

- a. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi :

- 1) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional;
 - 2) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan tata kelola pemenuhan gizi nasional;
 - 3) pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- b. Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi:
- 1) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional;
 - 2) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan dan penyaluran pemenuhan gizi nasional;
 - 3) pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
- c. Deputy Bidang Promosi dan Kerjasama Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputy Bidang Promosi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
- 1) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama pemenuhan gizi nasional;

- 2) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama pemenuhan gizi nasional;
 - 3) pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- d. Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
- 1) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - 2) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
 - 3) pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

1.7 Kerangka Berpikir

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH MAKAN BERGIZI
GRATIS KABINET PRABOWO GIBRAN DALAM UPAYA
PENANGANAN ANGKA STUNTING DI INDONESIA: STUDI KASUS
POSYANDU DI WILAYAH KOTA JAKARTA SELATAN**

Identifikasi Masalah

Belum adanya detail standar kebersihan, keamanan pangan, pengemasan, serta distribusi makanan dalam pelaksanaan MBG terjadi karena regulasi yang tersedia saat ini masih terbatas pada Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 yang hanya mengatur petunjuk teknis operasional MBG.

Kurangnya keterbukaan dalam penyediaan informasi publik yang ditunjukkan oleh Dokumen petunjuk teknis (juknis) MBG tidak diunggah di kanal resmi Badan Gizi Nasional (BGN) dan hanya ditemukan melalui situs berbagi dokumen.

Hadirnya kekhawatiran mengenai relevansi pendekatan militer dalam program gizi yang lebih bersifat promotif-preventif dikarenakan keterlibatan TNI dapat memperkuat kapasitas logistik

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi dari Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis di wilayah Kota Jakarta Selatan: Studi Kasus Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan?

Dalam keberjalanan dari Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis di wilayah Kota Jakarta Selatan: Studi Kasus Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan, faktor faktor apa saja yang

Tujuan Penelitian

Menganalisis implementasi dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis

<p>Implementasi Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis di Wilayah Kota Jakarta Selatan: Studi Kasus Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan:</p> <p>Sistem dan Tata Kelola</p> <p>Penyediaan dan Penyaluran</p> <p>Promosi dan Kerja Sama</p> <p>Pemantauan dan Pengawasan</p>	<p>Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis di Wilayah Kota Jakarta Selatan: Studi Kasus Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan:</p> <p>Standar dan Sasaran</p> <p>Kebijakan</p> <p>Sumber Daya</p> <p>Karakteristik Organisasi pelaksana</p> <p>Komunikasi Antarorganisasi</p> <p>Sikap Pelaksana</p> <p>Lingkungan Sosial, Ekonomi,</p>
--	---

1.8 Operasional Konsep

Beberapa kriteria akan diteliti dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana implementasi serta faktor penghambat dan faktor pendukung dari Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini menggunakan Operasionalisasi Konsep dengan bahan kajian berikut:

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan
Implementasi	Bidang Sistem dan tata Kelola	Kesesuaian dengan Tugas Deputi Sistem dan Tata Kelola
	Bidang Penyediaan dan Penyaluran	Kesesuaian dengan Tugas Deputi Penyediaan dan Penyaluran
	Bidang Promosi dan Kerja Sama	Kesesuaian dengan Tugas Deputi Promosi dan Kerja Sana
	Bidang Pemantauan dan Pengawasan	Kesesuaian dengan Tugas Deputi Pemantauan dan Pengawasan
Penghambat dan Pendukung	Standar dan Sasaran Kebijakan	Konsistensi distribusi makanan bergizi

		Jumlah penerima manfaat
	Sumber Daya	Ketersediaan bahan pangan dan tenaga pelaksana
	Karakteristik Organisasi Pelaksana	Efektivitas pelaporan dan pengawasan program
	Komunikasi Antarorganisasi	Kejelasan alur informasi antar lembaga
	Sikap Pelaksana	Kepedulian dan semangat kerja pelaksana
	Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	Tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena makan bergizi gratis. Metode kualitatif ini melibatkan deskripsi kondisi subjek dan objek, seperti

individu, masyarakat, atau lembaga, berdasarkan observasi dan argumentasi yang terkait dengan teori yang relevan sesuai temuan lapangan.

Peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012). Peneliti perlu memperdalam pengetahuan dan teori agar dapat bersikap skeptis dalam pengumpulan data, menganalisis, memvisualisasi dan meneliti sehingga analisis struktur objek menjadi lebih jelas dan mendalam.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, peneliti memilih metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dalam bentuk gambar dan kata-kata, bukan angka. Jika terdapat angka, harus memberikan gambaran rinci tentang kondisi objek dan subjek penelitian.

1.9.2 Situs Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Posyandu di Wilayah Kota Jakarta Selatan dan Badan Gizi Nasional untuk mendapatkan informasi dan gambaran secara rinci dan detail.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian atau yang kerap kali disebut sebagai informan atau narasumber, yaitu mengarah kepada orang yang mempunyai informasi relevan serta dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan fakta fakta yang ada di lapangan.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menetapkan informan penelitian. Purposive sampling adalah suatu cara pengambilan data yang didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini narasumber yang dipilih karena mereka dianggap paling mengetahui fenomena yang diteliti, sehingga mempermudah peneliti dalam menelusuri situasi sosial atau objek. Jika informasi yang diberikan belum lengkap, peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling untuk mengidentifikasi informan lain hingga data yang diperoleh lengkap. Adapun informan dalam penelitian yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis Studi Kasus Posyandu Wilayah Kota Jakarta Selatan, yaitu:

- a. Badan Gizi Nasional
 - 1) Bagian Bidang Sistem dan tata Kelola
 - 2) Bagian Bidang Penyediaan dan Penyaluran
 - 3) Bagian Bidang Promosi dan Kerjasama
 - 4) Bagian Bidang Pemantauan dan Pengawasan
- b. Posyandu Wilayah Kota Jakarta Selatan
 - 1) Posyandu ILP Tunas Harapan RW 06 (Mendapat penghargaan Posyandu Berprestasi Jakarta Selatan 2025)
 - 2) Posyandu Mawar RW 02 Cipete Utara (ILP RW 02) (Memenangkan lomba Posyandu terbaik pada Juni 2024)
 - 3) Posyandu Dahlia 1 Kelurahan Karet Kuningan (Memiliki rating paling rendah di google review)

- c. Pasien (Ibu Hamil)

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Peneliti menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi sehingga memerlukan analisa mendalam yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Pengumpulan data kualitatif meliputi studi dokumentasi, observasi, wawancara, dan diskusi.

Sumber data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2020), data primer merupakan sebuah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan tentang Implementasi Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis Kabinet Prabowo Gibran.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020), data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk penelitian. Pada penelitian ini, data sekunder diambil melalui buku, tinjauan pustaka, studi pustaka, dan dokumen resmi seperti undang-undang maupun jurnal-

jurnal yang relevan dengan implementasi Program Pemerintah Makan bergizi Gratis Kabinet Prabowo Gibran.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian dokumentasi diperlukan sebagai data-data pendukung dengan bentuk dokumen atau arsip yang diteliti dan dikaji. Hasil wawancara dapat dikatakan kredibel apabila terdapat foto-foto sebagai pendukung penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan berbentuk foto, rekaman saat wawancara, berita, jurnal, peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

b. Observasi

Upaya untuk memperoleh data dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung di situs penelitian dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dijadikan data. Penelitian ini melakukan observasi melalui pengamatan langsung di Posyandu wilayah Kota Jakarta Selatan.

c. Wawancara

Wawancara merupakan upaya untuk memperoleh informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti secara langsung terhadap narasumber guna memperoleh data primer atau hasil yang mendalam untuk memudahkan

dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana terdapat daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diajukan kepada responden dalam urutan yang sama. Setiap responden menerima pertanyaan yang sama dengan cara yang serupa, memungkinkan konsistensi dan perbandingan mudah antar jawaban.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data sebagai suatu proses menyusun dan merangkai data atau informasi secara terstruktur dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi melalui pengkategorian dan penguraian data dasar. Data yang dikumpulkan meliputi komentar peneliti, catatan lapangan, dokumen, foto, gambar, artikel, biografi, dan laporan. Pada penelitian kualitatif, data dari berbagai sumber dikumpulkan dengan berbagai teknik secara terus menerus hingga datanya jenuh. Data yang diperoleh dijabarkan, disintesis, disusun ke dalam pola, dan dipilih untuk disimpulkan dan dipelajari (Sugiyono, 2016:244). Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Syahrudin dan Salim, 2012:147-150) melalui tiga tahapan:

a. Reduksi data

Proses memilih, mengarahkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah dari catatan lapangan. Proses ini terus berlanjut selama penelitian. Data dari lapangan umumnya melimpah, sehingga

peneliti harus mencatatnya secara cermat dan rinci. Reduksi data mencakup merangkum, memilih inti, dan memusatkan perhatian pada hal-hal penting, seringkali dengan menyusunnya dalam bentuk ringkas, diagram, atau hubungan antar kategori.

b. Penyajian Data

Penyusunan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan langkah. Data yang semula berbentuk teks naratif dapat diubah menjadi berbagai representasi visual seperti grafik, matriks, diagram, dan jaringan. Semua ini disusun untuk memadukan informasi sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data dipresentasikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau memverifikasi data. Analisis data kualitatif dimulai dengan mengidentifikasi makna dari objek-objek yang diamati, mencatat pola, alur sebab-akibat, serta proposisi yang muncul. Kesimpulan pada awalnya bersifat umum, terbuka, dan skeptis, namun menjadi lebih terperinci dan meyakinkan seiring waktu. Kesimpulan ini mungkin baru muncul setelah semua data lapangan dikumpulkan, tergantung pada jumlah catatan, proses pengkodean, penyimpanan, dan teknik pencarian ulang yang digunakan. Verifikasi melibatkan peninjauan ulang catatan lapangan atau data melalui diskusi dengan rekan sejawat..

1.9.7 Kualitas Data

Validitas merujuk pada kesesuaian data yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya dari objek penelitian yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara apa yang dilaporkan dan keadaan sebenarnya yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang valid, digunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber, metode, dan waktu yang berbeda sebagai pembanding. Menurut William dalam Sugiyono (2016), triangulasi dilakukan melalui sumber, waktu, cara:

- a. Triangulasi sumber adalah metode validasi melalui pemeriksaan atau memverifikasi data yang didapatkan dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik adalah metode menguji kredibilitas data melalui pemeriksaan data dari sumber yang sama menggunakan teknik lain seperti observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu adalah metode validasi data dengan memeriksa data yang sama pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keabsahannya.

Dalam penelitian ini, validitas data diuji melalui triangulasi sumber. Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan satu informan, tetapi juga mewawancarai informan lainnya untuk mendapatkan informasi lebih akurat

sesuai fakta lapangan. Validitas data dipastikan dengan menganalisis hasil wawancara melalui observasi dan dokumentasi sesuai kondisi di lapangan.